



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

**Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017**

(dalam juta rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai	%										
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1,015,630	20.11%	1,051,836	19.23%	1,193,460	19.43%	1,373,821	21.22	1,519,401	22.01%	1,624,791	21.86%
B	Pertambangan dan Penggalian	1,764,832	34.94%	1,977,387	36.16%	2,165,066	35.25%	1,942,357	30.00	1,913,015	27.71%	2,065,706	27.79%
C	Industri Pengolahan	393,290	7.79%	353,368	6.46%	397,930	6.48%	443,209	6.85	482,529	6.99%	522,257	7.03%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,359	0.05%	2,345	0.04%	2,993	0.05%	4,702	0.07	5,962	0.09%	6,842	0.09%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,904	0.30%	15,914	0.29%	17,929	0.29%	20,127	0.31	21,799	0.32%	23,413	0.31%
F	Konstruksi	252,869	5.01%	271,358	4.96%	309,617	5.04%	356,624	5.51	405,434	5.87%	426,354	5.74%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	395,495	7.83%	435,814	7.97%	511,908	8.33%	582,076	8.99	659,737	9.55%	732,860	9.87%
H	Transportasi dan Pergudangan	147,476	2.92%	163,791	2.99%	185,977	3.03%	204,346	3.16	221,213	3.20%	237,333	3.20%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,377	1.97%	114,840	2.10%	127,252	2.07%	144,323	2.23	157,787	2.29%	169,101	2.27%
J	Informasi dan Komunikasi	167,866	3.32%	183,473	3.35%	210,444	3.43%	231,753	3.58	246,419	3.57%	263,652	3.55%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	47,312	0.94%	57,063	1.04%	65,082	1.06%	71,730	1.11	77,740	1.13%	85,133	1.15%
L	Real Estate	68,119	1.35%	73,551	1.34%	82,515	1.34%	89,330	1.38	98,944	1.43%	104,308	1.40%
M,N	Jasa Perusahaan	4,991	0.10%	5,652	0.10%	6,629	0.11%	7,511	0.12	8,256	0.12%	8,626	0.0001%
O	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	343,567	6.80%	391,525	7.16%	440,203	7.17%	521,088	8.05	546,437	7.91%	572,362	7.70%
P	Jasa Pendidikan	216,801	4.29%	239,882	4.39%	276,415	4.50%	309,957	4.79	348,336	5.04%	383,557	5.16%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,194	1.51%	87,737	1.60%	98,160	1.60%	113,918	1.76	127,343	1.84%	136,517	1.84%
R,S,T,U	Jasa lainnya	40,370	0.80%	43,288	0.79%	50,368	0.82%	57,973	0.90	64,341	0.93%	70,461	0.95%
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,051,452	100%	5,468,824	100%	6,141,945	100%	6,474,845	100%	6,904,693	100%	7,433,274	100%

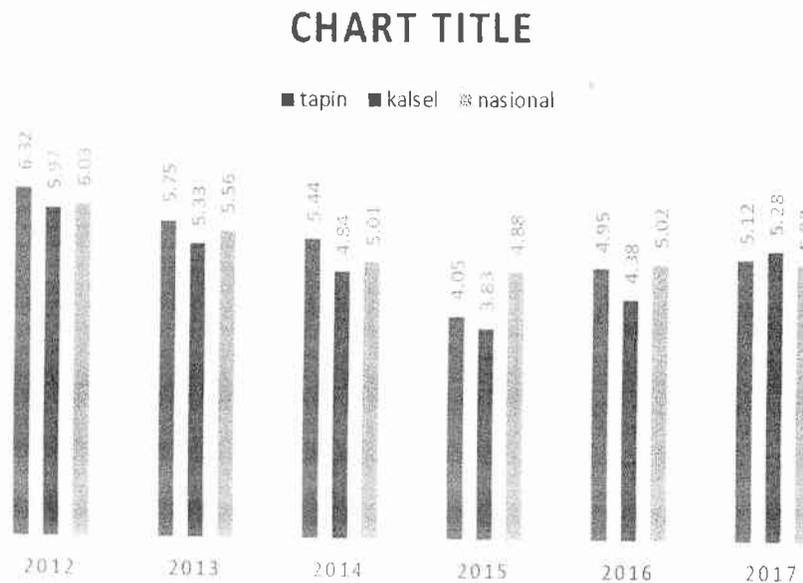
Sumber: www.tapin.bps.go.id, dan www.kalsel.bps.go.id



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, Kabupaten Tapin mampu meningkatkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari Rp. 5.607.922 juta menjadi Rp 5.895.172 juta. Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari Rp. 6.904.693 juta menjadi. Rp 7.433.274 juta.

Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Tapin.



Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS RI, diolah 2018

Data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama beberapa tahun terakhir pada umumnya menunjukkan posisi di atas Provinsi Kalimantan Selatan, namun sedikit berada di bawah nasional. Angka terakhir Tahun 2017 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,03 persen, sementara LPE Tapin sebesar 5,12 persen dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,28 persen.

2.2.2 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan



Perhitungan tingkat inflasi Kota Rantau, bahkan kota-kota di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama.

Pada tahun 2016, secara umum laju inflasi Kota Banjarmasin mencapai tingkat terendah 3,68 persen, di mana laju tertinggi inflasi tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional pada tahun 2015, 2016, dan 2017, nilai inflasi Kota Banjarmasin lebih tinggi dari nilai inflasi Nasional.

Perkembangan tingkat inflasi Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14
Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Banjarmasin	5,96	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82
Provinsi Kalimantan Selatan	n/a	n/a	n/a	5,14	3,57	3,82
Nasional	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, dan BPS Pusat

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Dari tahun 2012-2016 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan terus menerus. PDRB ADHB per kapita tahun 2012 sebesar 29,05 juta menjadi 37,43 juta di tahun 2016. Adapun PDRB ADHK per kapita tahun 2012 sebesar 26,49 juta menjadi 30,39 juta di tahun 2016.

Kondisi PDRB per kapita tersajikan dalam tabel perkembangan sebagai berikut.



Tabel 2.15
Perkembangan PDRB Per Kapita
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016
ADHB					
Nilai PDRB (Rp)	5,051,452	5,468,823.60	6,141,944.93	6,473,528.53	6,900,018.89
Jumlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	29,05	30,99	34,28	35,61	37,43
ADHK					
Nilai PDRB (Rp)	4,605,780	4,870,635.30	5,135,704.36	5,343,467.13	5,602,697.64
Jumlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	26,49	27,60	28,66	29,40	30,39

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tapin masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan perhitungan ADHB dan ADHK. Berdasarkan perhitungan pendapatan per kapita ADHB, penduduk Kabupaten Tapin memiliki pendapatan per kapita sebesar 29,05 juta di tahun 2012 dan 37,43 juta di tahun 2016. Adapun pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 28,20 juta di tahun 2012 dan 36,08 juta di tahun 2016.

Tabel 2.16
Perkembangan PDRB Per Kapita
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016
ADHB					
Nilai PDRB (Rp)	106,725,429.30	115,858,201.60	127,882,282.38	137,392,495.09	146,325,615.23
Jumlah Penduduk (jiwa)	3,784,981	3,854,485	3,922,790	3,989,793	4,055,479
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	28.20	30.06	32.60	34.44	36.08
ADHK					
Nilai PDRB (Rp)	96,697,838.70	101,850,536.40	106,779,397.64	110,867,877.85	115,727,546.78
Jumlah Penduduk (jiwa)	3,784,981	3,854,485	3,922,790	3,989,793	4,055,479
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	25.55	26.42	27.22	27.79	28.54

Sumber: www.kalsel.go.id

Berdasarkan perhitungan pendapatan per kapita ADHK, penduduk Kabupaten Tapin memiliki pendapatan per kapita sebesar 26,49 juta di tahun



2012 dan 30,39 juta di tahun 2016. Adapun pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 25,55 juta di tahun 2012 dan 28,54 juta di tahun 2016.

2.2.4 Indeks Gini/Koefisien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Berikut adalah data perkembangan koefisien gini tahun 2012-2017.

Tabel 2.17
Perkembangan Koefisien Gini Tahun 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Tapin	0,30	0,28	0,26	0,35	0,32	0,33
Provinsi Kalimantan Selatan	0,36	0,36	0,33	0,35	0,35	0,35
Nasional	0,413	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan

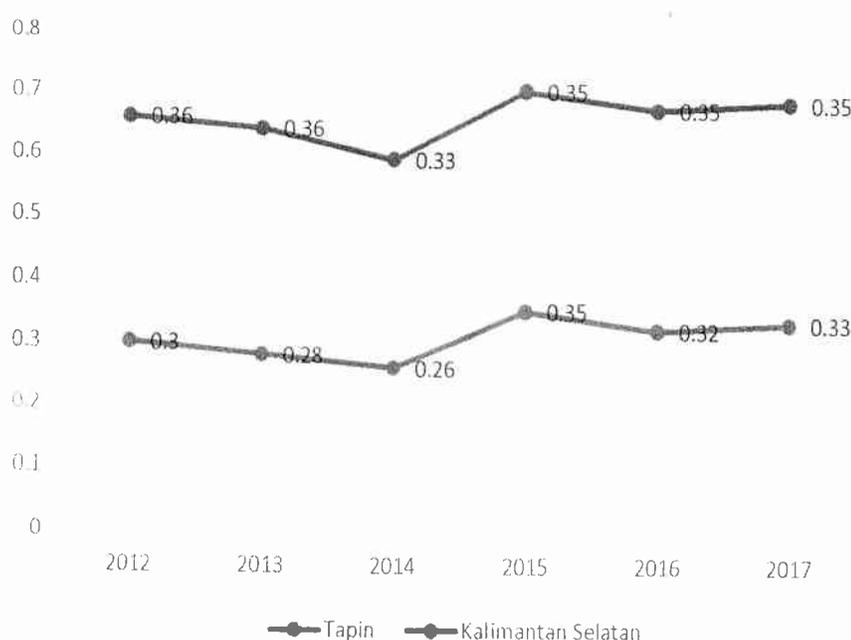
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan Kabupaten Tapin mengalami fluktuasi selama periode 2012-2017. Ketimpangan di Kabupaten Tapin berada di level rendah dan sedang. Ketimpangan tertinggi di Kabupaten Tapin sebesar 0,35 di tahun 2015, sedangkan ketimpangan terendah sebesar 0,26 di tahun 2014.

Ketimpangan di Provinsi Kalimantan Selatan selalu lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2017, kecuali di



tahun 2016 sebesar 0,35. Angka ketimpangan tersebut sama nilainya dengan angka ketimpangan di Kabupaten Tapin.

Ketimpangan di Kabupaten Tapin lebih rendah dibandingkan ketimpangan Nasional selama periode tahun 2012-2017. Di tahun 2012, ketimpangan di Kabupaten Tapin sebesar 0,30, sedangkan ketimpangan Nasional sebesar 0,413. Di tahun 2017, ketimpangan di Kabupaten Tapin sebesar 0,33, sedangkan ketimpangan Nasional sebesar 0,391. Ketimpangan Nasional cenderung menurun, sedangkan ketimpangan di Kabupaten Tapin cenderung berfluktuasi.

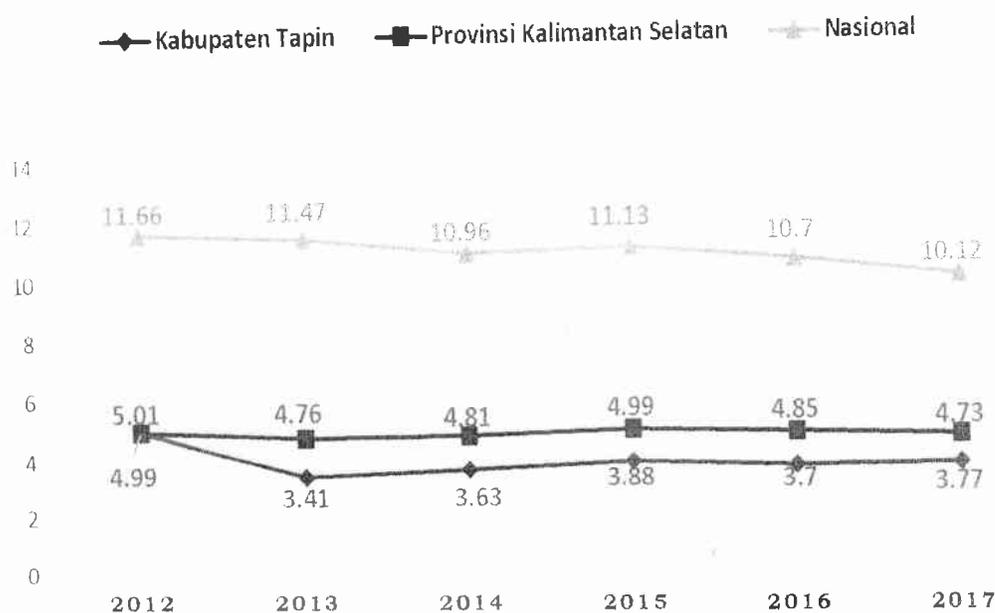


Gambar 2.3
Perbandingan Koefisien Gini
Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012-2017

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, dan www.tapinkab.bps.go.id

2.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.



Gambar 2.4

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Indonesia, diolah 2018

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Tapin menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi naik dan turun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin tertinggi sebesar 4,99 persen di tahun 2012, sedangkan terendah sebesar 3,41 persen di tahun 2013. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin dari kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Selain indikator persentase penduduk miskin, terdapat indikator kemiskinan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu: dan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tapin sebesar 0,40, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 0,25. Peningkatan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan rata-rata



pengeluaran penduduk miskin di kabupaten Seruyan menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Lebih lanjut dari data yang ada, diketahui Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tapin sebesar 0,08, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 0,03. Peningkatan nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin besar.

Tabel 2.18
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	8.717	6.045	6.518	7.010	6.810	7.011
Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	268.641	295.353	314.696	330.033	369.153	390.488
Persentase Penduduk Miskin (PO)	4,99	3,41	3,63	3,88	3,7	3,77
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,48	0,34	0,37	0,46	0,25	0,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,08	0,05	0,06	0,08	0,03	0,08

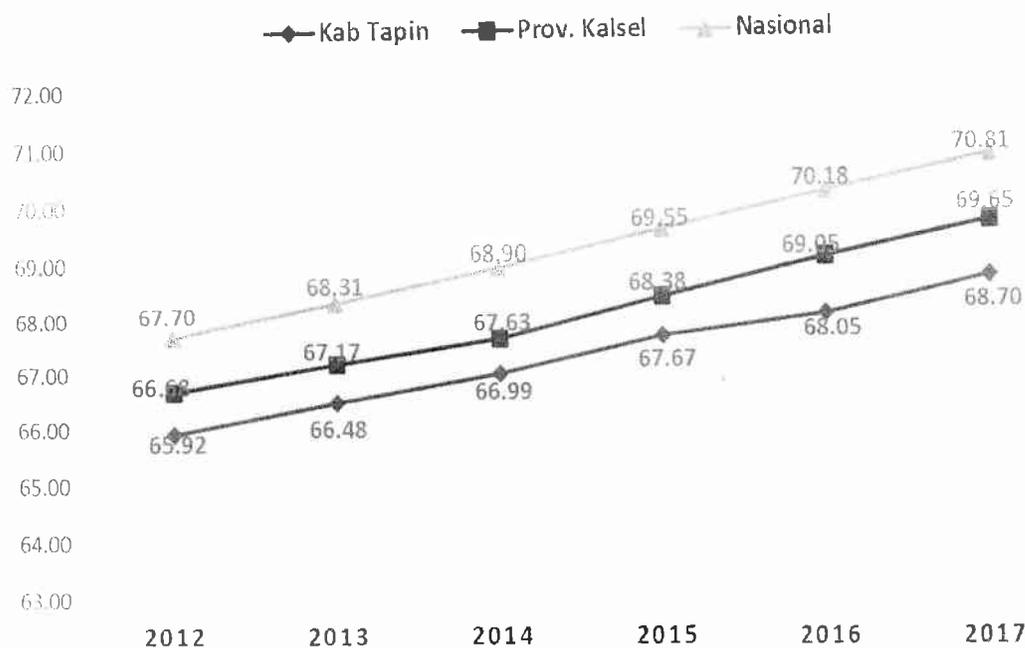
Sumber: BPS Indonesia Tahun 2017

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai IPM Kabupaten Tapin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 sebesar 65,92 sedangkan di tahun 2017 sebesar 68,70. Bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan, maka IPM Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2017 lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi terakhir di tahun 2017, IPM Kabupaten Tapin adalah 68,70, sedangkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69,65.

Tidak jauh berbeda dengan provinsi Kalimantan Selatan, nilai IPM Kabupaten Tapin selalu berada dibawah dari IPM nasional. IPM nasional Tahun 2017 mencapai 70,81, lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin



Gambar 2.5

IPM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Indonesia, diolah 2018

2.2.7 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Melek Huruf adalah 100%. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Melek Huruf
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	96,87	93,00	93,29	97,10	98,34	98,87

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi. Angka Melek Huruf tertinggi sebesar 98,87 di tahun 2017, sedangkan terendah sebesar 93,00 di tahun 2013.



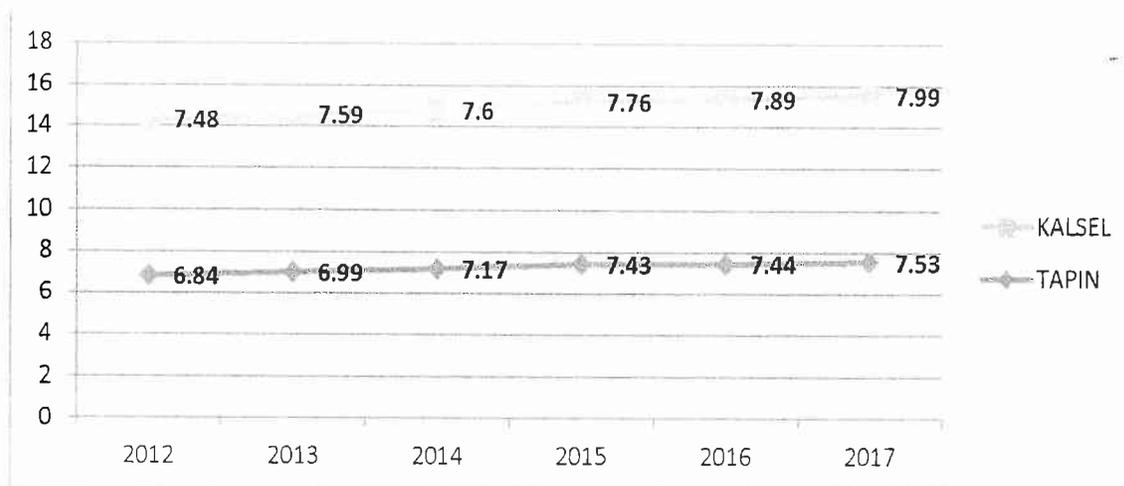
Tabel 2.20
Persentase Buta Huruf dan Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
Buta Huruf (%)	2,90	1,66	1,13
Laki-laki	1,43	0,79	0,46
Perempuan	4,39	2,50	1,79
Melek Huruf (%)	97,10	98,34	98,87
Laki-Laki	98,57	99,21	99,54
Perempuan	95,61	97,50	96,27

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III.



Gambar 2.6
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Sumber: www.kalsel.bps.go.id

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,53 artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah



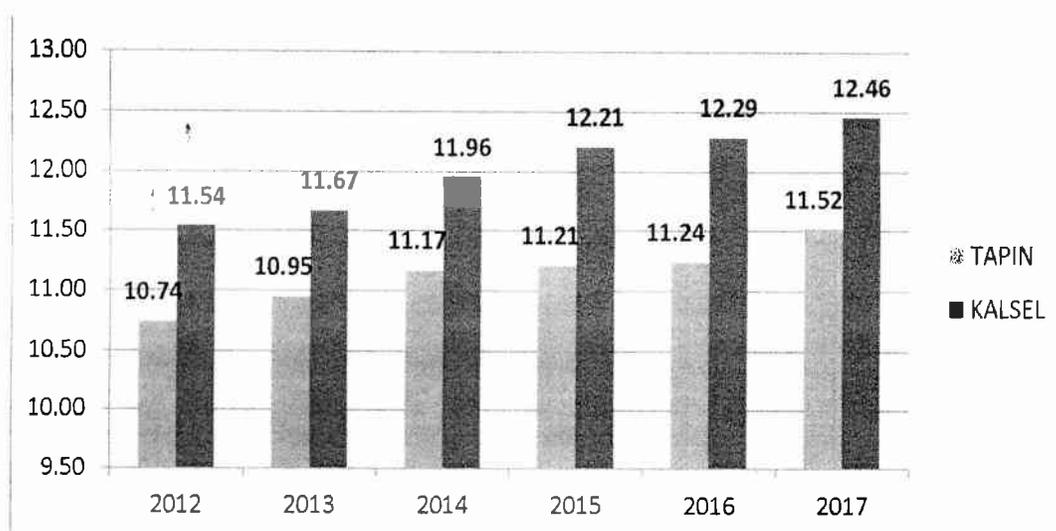
sampai 7 tahun 5 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2017. Pada tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,48 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 6,84. Data tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,99 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,53.

2.2.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dari data beberapa tahun terakhir, dapat diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung meningkat setiap tahunnya. Harapan lama sekolah di tahun 2012 sebesar 10,74 meningkat menjadi 11,52 di tahun 2017.

Berdasarkan data harapan lama sekolah, Kabupaten Tapin berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2012-2017. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin perlu meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah agar bisa setaraf dengan Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.7
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017



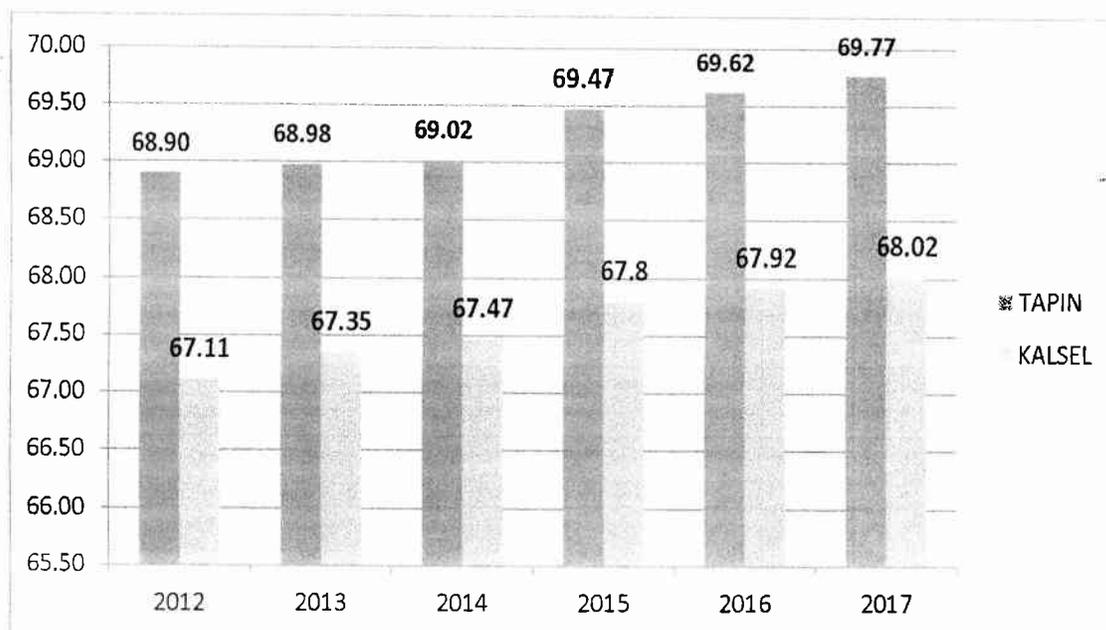
Sumber: www.kalsel.bps.go.id

2.2.10 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

AHH di Kabupaten Tapin lebih selama periode tahun 2012-2017 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini berlangsung selama beberapa tahun terakhir, dan pada tahun 2017, AHH Kabupaten Tapin mencapai 69,77 tahun sementara AHH Provinsi Kalimantan Selatan berada di angka 68,02 tahun.



Gambar 2.8

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Sumber: www.kalsel.bps.go.id

2.2.11 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari



berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Perkembangan jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Tapin terlihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.21
Perkembangan Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Balita Gizi Buruk	-	268	182	182	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa selama periode tahun 2012-2016 jumlah balita gizi buruk tertinggi sebesar 268 di tahun 2013, sedangkan Tahun 2014 dan 2015 stabil di angka 182.

2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

Tabel 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2017

TPAK	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Tapin	67,52	69,89	71,29	71,75	-	71,92
Prov. Kalimantan Selatan	72,01	69,31	69,46	69,73	71,57	70,06

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tapin meningkat dari 67,52 persen di tahun 2012 menjadi 71,92 persen di tahun 2017. TPAK di Kabupaten Tapin selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2012-2017, kecuali di tahun 2012. Pada tahun 2012, TPAK di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,01, sedangkan TPAK di Kabupaten Tapin sebesar 67,52.

Tabel 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015 dan 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2015	2017
Laki-laki	84,61	85,50
Perempuan	58,77	58,14
Total	71,75	71,92

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2017 yaitu dari 84,61 persen menjadi 85,50 persen. Sebaliknya TPAK perempuan mengalami penurunan yaitu dari 58,77 menjadi 58,14.

2.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Berdasarkan data, pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin laki-laki sedikit mengalami peningkatan, yaitu dari 4,39 persen di tahun 2015 menjadi 4,93 persen di tahun 2017, dan sebaliknya untuk perempuan mengalami penurunan.



Tabel 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2015	2016	2017
Laki-laki	4,39		4,93
Perempuan	6,22		3,57
Total	5,14		4,39

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berikut ini adalah data pengangguran yang terjadi di Kabupaten Tapin dalam enam tahun terakhir.

Tabel 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Tapin	6,69	5,24	1,79	5,14	-	4,39
Provinsi Kalimantan Selatan	5,14	3,66	3,80	4,92	5,45	4,77
Nasional	6,13	6,17	5,94	5,81	5,61	5,50

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPS Pusat

Dari tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin cenderung berfluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Di tahun 2014 merupakan posisi TPT paling rendah di Kabupaten Tapin sebesar 1,79 persen, sedangkan TPT tertinggi sebesar 6,69 persen di tahun 2012.

Posisi TPT di Kabupaten Tapin lebih tinggi dibandingkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2012, 2013, dan 2015. Di tahun 2012, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 6,69 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,14 persen. Di tahun 2013, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 5,24 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,66 persen. Di tahun 2015, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 5,14 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,92 persen.

Sementara itu, TPT Kabupaten Tapin lebih rendah dibandingkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2014, dan 2017. Di tahun 2014,



TPT di Kabupaten Tapin sebesar 1,79 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,80 persen. Di tahun 2017, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 4,39 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,77 persen. Bila dibandingkan dengan nasional, TPT Kabupaten Tapin lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Nasional selama periode tahun 2012-2017. TPT di Kabupaten Tapin cenderung berfluktuasi, sedangkan TPT Nasional cenderung menurun.

2.2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau disebut juga sumber daya manusia.

Tabel 2.26
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Penjelasan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk yang bekerja	79,042	84,326	90,766	89,760	-	93,726
Angkatan Kerja	84,706	88,991	92,425	94,619	-	98,027
Rasio	93,31%	94,76%	98,21%	94,86%	-	95,61%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio tertinggi 98,21 persen di tahun 2014 dan rasio terendah sebesar 93,31 persen di tahun 2012.

2.2.15 Indeks Pembangunan Gender (PG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Data periode 2012 sampai dengan 2015 baik IPG maupun IDG Kabupaten Tapin menunjukkan peningkatan. Kondisi terakhir Tahun 2015 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS menunjukkan IPG Kabupaten tapin sebesar 83,80 dan IDG sebesar 72,88.

Bila dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Selatan (88,55), maka posisi IPG Kabupaten Tapin masih lebih rendah. Namun untuk IDG, posisi Kabupaten Tapin lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan. IDG Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,05.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Tapin					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82,88	83,41	83,54	83,80
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,39	71,60	72,76	72,88
Provinsi Kalimantan Selatan					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,33	88,33	88,46	88,55
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,40	65,60	68,22	70,05

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS



2.2.16 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2012-2016 menunjukkan prestasi yang meningkat. Opini BPK untuk tahun 2012-2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan tahun 2015-2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.28
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.2.17 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian adalah sektor utama pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tapin. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan. Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mengalami peningkatan dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Tapin.

Tabel 2.29
Kontribusi Sektor Pertanian ADHB
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Sub Sektor Pertanian	920,160.78	950,859.74	1,081,274.76	1,221,355.81	1,350,982.23
PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
Kontribusi	18,22	17,39	17,60	18,87	19,58

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016



Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berfluktuasi selama tahun 2012-2016. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tertinggi sebesar 19,58 persen di tahun 2016, terendah sebesar 17,39 persen di tahun 2013.

2.2.18 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Melihat data di bawah, menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki kontribusi yang kecil terhadap PDRB ADHB dan cenderung menurun sampai dengan tahun 2016. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tertinggi sebesar 0,31 persen di tahun 2013, terendah sebesar 0,28 persen di tahun 2012 dan 2016.

Tabel 2.30
Kontribusi Sektor Kehutanan ADHB
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Sub Sektor Kehutanan	15,234.45	16,829.38	17,901.90	18,956.74	19,470.92
PDRB Total	5,468,824	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
Kontribusi	0,28	0,31	0,29	0,29	0,28

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

2.2.19 Kontribusi Sektor Pertambangan

Pada sektor energi dan sumber daya mineral, kontribusi sektor pertambangan selama periode tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor pertambangan di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Pertambangan ADHB
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Sektor Pertambangan	1,764,832	1,977,387	2,165,066	1,944,870	1,916,063
2	PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
3	Kontribusi	34,94	36,16	35,25	30,04	27,77

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016



Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tertinggi sebesar 36,16 persen di tahun 2013, terendah sebesar 27,77 persen di tahun 2016.

2.2.20 Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2016 terus mengalami kenaikan. Tahun 2012, PDRB ADHB Kabupaten Tapin sektor perdagangan sebesar 7,83 persen, sedangkan di tahun 2016 telah mencapai 9,56 persen.

Tabel 2.32
Kontribusi Sektor Perdagangan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Sektor Perdagangan	395,495	435,814	511,908	582,076	659,737
2	PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
3	Kontribusi (%)	7,83	7,97	8,33	8,99	9,56

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

2.2.21 Kontribusi Sektor Industri

Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Industri
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Sektor Perindustrian	393,290	353,368	397,930	443,209	482,529
2	PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
3	Kontribusi (%)	7,79	6,46	6,48	6,85	6,99

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016



Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tapin tertinggi sebesar 7,79 persen di tahun 2012, terendah sebesar 6,46 persen di tahun 2013.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.3.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.34
Persentase Konsumsi RT
di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT Pangan	469,969	587,216	582.228
2	Total Pengeluaran RT non Pangan	458,849	554,529	450.585
3	Total Pengeluaran	928,818	1,141,745	1.032.813

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2016, 2017



Berdasarkan tabel di atas, besar konsumsi RT lebih tinggi untuk sektor pangan dibandingkan non pangan selama periode tahun 2015-2017.

2.3.2 Angka kriminalitas yang tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.35
Angka Kriminalitas
di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kriminalitas	296	284	220	316
Jumlah Penduduk	179,166	181,778	184,330	186,672
Angka Kriminalitas	16,52	15,62	11,94	16,93

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2016, 2017, 2018

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 110.000 penduduk.

2.3.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja



yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Pada Tahun 2012 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 46,72 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47,69 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Adapun tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,25 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47,25 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

Tabel 2.36
Rasio Ketergantungan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	48,003	49,381	49,879	50,308	50,650
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	7,441	7,605	7,872	8,168	8,496
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	55,444	56,986	57,751	58,476	59,146
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	118,682	119,482	121,415	123,302	125,184
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	46,72	47,69	47,56	47,43	47,25

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut adalah tabel urusan pemerintah daerah yang kemudian akan dibahas masing-masing fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.



A. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Berikut adalah pembahasan fokus layanan urusan wajib untuk tiap urusan wajib.

2.4.1 Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin dari tahun 2013-2017.



Tabel 2.37
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umur 7-12 tahun (%)	98,42	98,00	100	98,76	99,98	99,98
Umur 13-15 tahun (%)	63,83	82,06	94,99	87,13	92,02	92,49

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin Tahun 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas APS umur 7-12 tahun mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2016. APS tertinggi sebesar 100 di tahun 2014, sedangkan terendah sebesar 98 persen di tahun 2013. Untuk APS umur 13-15 tahun juga mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2017. APS tertinggi sebesar 94,99 persen di tahun 2014, sedangkan terendah sebesar 63,83 persen di tahun 2012.

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Angka Partisipasi Sekolah	2015	2016	2017
Umur 7-12 tahun (%)	98,76	99,98	99,98
Laki-laki	99,11	99,98	99,98
Perempuan	98,37	99,98	99,98
Umur 13-15 tahun (%)	87,13	92,02	93,96
Laki-laki	90,60	87,50	95,70
Perempuan	84,12	98,37	92,32
Umur 16-18 tahun (%)	54,19	58,86	59,84
Laki-laki	58,05	62,54	59,51
Perempuan	50,49	56,00	60,11

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas APS pada jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan persentasenya pada umur 7-12 tahun dan mengalami fluktuasi pada umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Sedangkan pada jenis kelamin



perempuan mengalami peningkatan pada umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun dan mengalami fluktuasi pada umur 13-15 tahun.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, rasio guru/murid juga indikator untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut.

Tabel 2.39
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI					
Jumlah Guru	1,835	1,735	2,383	1,788	1,788
Jumlah Murid	20,931	20,841	20,526	20,088	20,133
Rasio	87.67	83.25	116.10	89.01	88.81
SMP/MTs					
Jumlah Guru	717	711	706	692	692
Jumlah Murid	7,240	7,337	7,986	7,560	8,075
Rasio	99,03	96,91	88,40	91,53	85,70

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar menunjukkan tren yang berfluktuasi naik dan turun selama periode tahun 2012-2016. Kondisi tahun 2016 menunjukkan untuk 1.000 siswa SD/MI tersedia 88 orang guru, dan untuk siswa SMP/MTs tersedia 85 orang guru.

2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.



Tabel 2.40
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umur 16-18 tahun (%)	38,18	57,84	69,10	54,19	58,86	59,84

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, angka partisipasi sekolah untuk pendidikan SMA/MA/SMK terus mengalami fluktuasi naik dan turun. Angka partisipasi sekolah tertinggi di tahun 2014 sebesar 69,10 persen. Adapun angka partisipasi sekolah terendah di tahun 2012 sebesar 38,18 persen.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SLTA/MA/SMK					
Jumlah Guru	325	367	129	429	429
Jumlah Murid	4,971	5,268	1,393	5,561	5,778
Rasio	65,38	69,67	92,61	77,14	74,25

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru terhadap murid untuk pendidikan menengah menunjukkan tren yang berfluktuasi naik dan turun selama periode tahun 2013-2016. Rasio guru terhadap murid tertinggi di tahun 2014 sebesar 92,61. Adapun rasio terhadap murid terendah di tahun 2012 sebesar 65,38.



3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.42
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Kasar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	103,28	106,07	109,54	114,99	116,04	111,23
SLTP/MTs (%)	84,49	81,95	81,77	76,39	90,05	83,26
SLTA/MA/SMK (%)	43,22	59,71	85,86	55,90	63,12	75,62

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, dan BPS Indonesia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016 cenderung meningkat pada jenjang SD/MI. Namun di tahun 2017 menurun 4,81%. Sedangkan pada jenjang SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK cenderung berfluktuasi naik turun.

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Kasar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	104,47	108,81	110,52	111,14	111,63	110,30
SLTP/MTs (%)	84,55	79,52	82,45	82,81	85,78	85,70
SLTA/MA/SMK (%)	66,75	62,14	71,36	73,88	76,88	77,44

Sumber: www.kalsel.bps.go.id dan BPS Indonesia



APK Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APK Kabupaten Tapin untuk semua jenjang pendidikan selama periode tahun 2012-2017. APK Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APK Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa tahun dan jenjang pendidikan tertentu. Uraian APK Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APK Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- ✓ APK SD/MI untuk tahun 2015 dan 2016;
- ✓ APK SLTP/MTs untuk tahun 2013 dan 2016;
- ✓ APK SLTA/SMK/MA untuk tahun 2014.

Tabel 2.44

Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017
SD/MI (%)	114,99	116,04	111,23
Laki-Laki	117,05	115,34	110,48
Perempuan	112,78	116,04	112,35
SLTP/MTs (%)	76,39	90,05	83,26
Laki-Laki	71,92	100,91	86,36
Perempuan	80,27	82,31	80,32
SLTA/MA/SMK (%)	55,90	63,12	75,62
Laki-Laki	60,95	62,76	78,50
Perempuan	51,05	63,40	73,29

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Jenis Kelamin Laki-laki mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI, mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK dan mengalami fluktuasi pada SLTP/MTs. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan pada jenjang Pendidikan SLTA/MA/SMK dan fluktuasi pada jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs.

4